

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Deisy Debora ^{a,1*}, Meidy Kantohe ^{b,2}, Steven V. Tarore ^{c,3}, Margareth Rantung ^{d,4}

^{abcd} Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

^{1,*} wenasdeisy45@gmail.com; ² meidysskantohe@unima.ac.id; ³ steventarore@unima.ac.id; ⁴

margarethrantung@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Original local
government revenue,
Transfers to region,
Regional financial
independence

The decentralization system means the delegation of authority from the central government to the local government to utilize their own financial resources and is supported by financial balance. However, provinces are still found to have low financial capacity. This can be seen from the Regional Fiscal Capacity level indicator in the Very Low category. The purpose of this research is to examine the influence of original local government revenue and Transfer to Regions on Regional Financial Independence in Regencies and Cities in North Sulawesi Province. This type of research uses quantitative methods. Data collection techniques use secondary data. The analytical method used for analysis is multiple linear regression which the previous data that will be processed is first tested using the classic assumption test. Meanwhile, to process research data using the SPSS version 26.0 computer program. The results of research through simultaneous testing (F test), Original local Government Revenue and Transfers to Regions have an influence on Financial Independence in Regencies and Cities in North Sulawesi Province. After carrying out partial testing (t test), Regional Original Income has a positive relationship with Regional Financial Independence, while Transfers to Regions have a negative relationship with Regional Financial Independence.

INTISARI

Kata kunci:
Pendapatan asli daerah,
Transfer ke daerah,
Kemandirian keuangan
daerah

Sistem desentralisasi membuat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Namun masih ditemui provinsi yang memiliki kemampuan keuangan rendah. Hal ini diantaranya dapat dilihat dari indikator tingkat Kapasitas Fisal Daerah dengan kategori Sangat Rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Transfer ke Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder. Metode analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda yang sebelumnya data yang akan diolah terlebih dahulu di uji dengan menggunakan uji asumsi klasik. Sedangkan untuk pemrosesan data penelitian menggunakan program komputer SPSS versi 26.0. Hasil penelitian melalui pengujian secara simultan (uji F) Pendapatan Asli Daerah, dan Transfer ke Daerah mempunyai pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Setelah dilakukan pengujian secara parsial (uji t), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dengan hubungan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Transfer ke Daerah berpengaruh dengan hubungan negative terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Diterima : 16-Des-23
Dipublish : 17-Des-23

Copyright © 2023 (Deisy Debora). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Prinsip Otonomi daerah memberikan kesempatan yang seluasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi daerah secara optimal dan terpadu. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan negara dimaksudkan untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat [1].

Desentralisasi pemerintahan dan Otonomi daerah dimulai dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut menandai diperluasnya desentralisasi dalam bidang pemerintah, sehingga pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah [2], [3].

Sistem desentralisasi membuat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, sehingga daerah yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut disebut daerah otonom. Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah yaitu dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Sebagian besar kewenangan pemerintah pusat dipangkas dan diserahkan kepada daerah [4].

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan otonomi daerah, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi dan membiayai kebutuhan daerah masing-masing. Begitupun dengan keuangan daerah, adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah [5].

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses pembangunan daerah. Pembangunan yang baik dilakukan secara berkelanjutan sesuai prioritas dan kebutuhan yang ada dan berfokus pada sasaran pembangunan nasional yang telah ditentukan dalam pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek [6].

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah tahun 2022, Provinsi Sulawesi Utara termasuk Provinsi yang tingkat Kapasitas Fiskal Daerah berada di kategori "Sangat Rendah" jika dibandingkan dengan daerah lainnya seperti di Indonesia bagian tengah dan timur seperti Prov. Papua, Prov. Maluku Utara, Prov Papua Barat, Prov. NTT dan Prov. NTB.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran tingkat Kapasitas Fiskal Daerah atau Kemandirian

Keuangan Daerah. Hal ini dapat menunjukkan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah yang mana, semakin besar pendapatan asli daerah dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin tinggi. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah [7].

Selain pendapatan asli daerah, dana Transfer ke Daerah atau dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan [8]. Akan tetapi, diharapkan setiap daerah tidak menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah melainkan menjadikannya sebagai sumber pendapatan pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan-permasalahan yang ada, menarik perhatian peneliti dalam mencari fakta atau teori untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis/Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Sugiyono mengatakan bahwa: Pendekatan kuantitatif kausal merupakan pendekatan dalam penelitian yang mencari hubungan antar satu variabel dengan variabel lain yang memiliki sebab akibat. Penelitian ini menguji hipotesis yang ditetapkan untuk mencari pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian kausalitas didesain untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat tersebut sudah dapat diprediksi oleh peneliti sehingga peneliti dapat menyatakan klasifikasi variabel penyebab, variabel antara dan variabel terikat [9].

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan mengambil data melalui website resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan laporan realisasi APBD Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2016 - 2021. Data

penelitian diunduh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah [10]

2.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya [9]. Penentuan populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah 15 pemerintah kota/kabupaten dengan jumlah data sebanyak 90.

2. Sampel

Penentuan jumlah sampel diolah dari jumlah populasi, maka dilakukan dengan teknik sesuai dengan judul penulisan yaitu non probability sampling. Jenis non probability sampling digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota dijadikan sampel [7]. Dengan jumlah sampel sama dengan jumlah anggota populasi sebanyak yaitu sebanyak 90 data sampel.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu menghimpun dan mencatat data sekunder yang telah tersedia pada lembaga atau unit analisis terkait dengan variabel yang diteliti. Data yang digunakan ialah data sekunder yang bersumber dari data APBD dan laporan realisasi APBD pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah [10]

2.5 Instrumen Penelitian

Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan alat-alat berupa dokumentasi data tertulis runtun waktu (time series) yang bersifat kuantitatif periode tahun 2016-2021 dan studi kepustakaan sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai dasar teori dan pembanding.

2.6 Teknik Analisis Data

Pengujian data pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 26. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator/BLUE) yang terdiri

dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi,

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independent dapat menjelaskan variabel dependennya. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1. Jika nilai R^2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

3. Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis maka digunakan statistik pengujian simultan (uji F) untuk mengetahui hubungan variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, dan pengujian parsial (Uji t) untuk mengetahui hubungan variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen.

4. Uji Regresi Linier Berganda

Melakukan interpretasi model regresi linier berganda dimana akan diperoleh persamaan regresi:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Kemandirian Keuangan

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Transfer ke Daerah (TKD)

a = Konstanta

ε = Error

β = Koefisien Regresi

3. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa dokumen realisasi APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021 yang didapatkan dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan www.djpk.kemenkeu.go.id Pada penelitian ini terdapat 4 data yaitu Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah, Dana Bagi Hasil dari Provinsi [10].

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|----------------------|----|-----------|------------|--------------|----------------|
| PAD | 90 | 10521157 | 377379619 | 67401607.94 | 78125967.939 |
| TKDD | 90 | 460137289 | 1062646523 | 671010060.80 | 158545660.229 |
| KEMANDIRIAN KEUANGAN | 90 | 2.06 | 29.08 | 7.7569 | 5.91549 |
| Valid N (listwise) | 90 | | | | |

Berdasarkan tabel hasil perhitungan diatas dengan jumlah 90 Sampel dapat dijelaskan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai tabel diatas dalam ribuan rupiah memiliki nilai minimum sebesar Rp.10.521.157, nilai maximum sebesar Rp377.379.619, dan rata-rata Rp67.401.607; Transfer ke Daerah sesuai tabel diatas dalam ribuan rupiah memiliki nilai minimum sebesar Rp460.137.289, nilai maximum sebesar Rp10.626.446.523, nilai rata-rata sebesar Rp671.010.060; Kemandirian Keuangan sesuai tabel diatas memiliki nilai minimum sebesar 2,06 %, nilai maximum sebesar 29,08 %, dan nilai rata-rata 7,7569 %.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .996 ^a | .992 | .992 | .02488 |

a. Predictors: (Constant), TKD_LG, PAD_LG

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN_KEUANGAN_LG

Koefisien determinasi memiliki angka interval antara 0 sampai 1, Jika nilai R^2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Pada tabel 5.6 angka R square yaitu 0,992 merupakan angka pengkuadratan dari koefisien korelasi atau $(0,996)^2 = 0,992$. R square biasa disebut dengan koefisien determinasi, angka tersebut berarti 93,9% kemandirian keuangan dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD). Sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

3. Uji Hipotesis

3.1 Uji F (Simultan)

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|----------|-------------------|
| 1 | Regression | 7.028 | 2 | 3.514 | 5678.650 | .000 ^b |
| | Residual | .054 | 87 | .001 | | |
| | Total | 7.081 | 89 | | | |

a. Dependent Variable: KEMAND LG

b. Predictors: (Constant), TKDD LG, PAD LG

Dari hasil pengujian F dapat dilihat variabel independent yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini ditunjukkan pada perbandingan Fhitung dengan Ftabel dan signifikansi hitung berada di angka 0,05. Berdasarkan hasil pengujian statistic Uji Simultan (Uji F) Fhitung diperoleh $5678,650 >$ dari Ftabel 3,100 dan sig. hitung $0,000 < 0,05$ (α : 5%) sehingga H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara periode 2016 - 2021.

3.2 Uji t (Parsial)

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 2.284 | .289 | | 7.892 | .000 |
| | PAD_LG | .957 | .011 | 1.227 | 88.909 | .000 |
| | TKD_LG | -1.000 | .039 | -.353 | -25.592 | .000 |

a. Dependent Variable: KEMAND_LG

1) Hipotesis 1

$$Y = 2,284 + 0,957 X_1$$

Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk menentukan persamaan regresi. Nilai a (konstanta) sebesar 2,284 menyatakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama dengan 0 maka besarnya nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh adalah sebesar 0,957 yang menunjukkan apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1 kali maka Kemandirian Keuangan akan meningkat sebesar 0,957 kali dengan asumsi variabel lain tetap (konstan)

Kemudian pengujian signifikansi antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Kemandirian Keuangan (Y) yang dilakukan dengan uji t. Nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan (Y). Nilai thitung yang diperoleh sebesar 88,909, sementara nilai ttable adalah 1,663. Nilai thitung $88,909 >$ tabel 1,663 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan (Y).

2) Hipotesis 2

$$Y = 2,284 - 1,000 X_2$$

Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk menentukan persamaan regresi. Nilai a (konstanta) sebesar 2,284 menyatakan bahwa jika Transfer ke Daerah (TKD) sama dengan 0 maka besarnya nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh adalah sebesar -1,000 yang menunjukkan apabila Transfer ke Daerah (TKD) meningkat sebesar 1 kali maka Kemandirian Keuangan akan menurun sebesar 1 kali dengan asumsi variabel lain tetap (konstan)

Pengujian signifikansi antara Transfer ke Daerah (X_2) terhadap Kemandirian Keuangan (Y) yang dilakukan dengan uji t. Nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05

($0,000 < 0,05$) menyatakan bahwa Transfer ke Daerah (X2) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan (Y). Nilai thitung yang diperoleh sebesar -25,592, sementara nilai ttable adalah 1,663. Nilai thitung $25,592 < t_{tabel}$ 1,663 sehingga dapat disimpulkan bahwa Transfer ke Daerah (X2) berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan (Y).

3) Uji Hipotesis 3

$$Y = 2,284 + 0,957 X_1 - 1,000 X_2$$

Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk menentukan persamaan regresi. Nilai a (konstanta) sebesar 2,284 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel independent (Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah) atau variabel independent sama dengan nol, maka besarnya nilai Kemandirian Keuangan adalah 2,284. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (b1) sebesar 0,957 berarti jika Pendapatan Asli Daerah bertambah 1 kali maka akan menambah tingkat Kemandirian Keuangan sebesar 0,957 kali. Koefisien regresi Transfer ke Daerah (b2) sebesar -1 kali berarti jika Transfer ke Daerah bertambah 1 kali maka akan mengurangi tingkat Kemandirian Keuangan sebesar 1 kali.

Pengujian signifikansi antara Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Transfer ke Daerah (X2) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan (Y) dilakukan dengan menggunakan uji F. Nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengujian adalah sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), sehingga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Transfer ke Daerah (X2) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan (Y). Nilai Fhitung diperoleh 5678,650 dan nilai sebesar Ftabel 3,100 (Fhitung $5678,650 > F_{tabel}$ 3,100). Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Transfer ke Daerah (X2) secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan (Y).

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan uji signifikansi individual (uji t) yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial antara variabel independent dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah (Y) sehingga hipotesis pertama diterima.

Nilai a (konstanta) diperoleh sebesar 2,284, nilai b1 yang diperoleh sebesar 0,957 sehingga yang menunjukkan bahwa jika Pendapatan Asli

Daerah (PAD) naik 1 kali maka Kemandirian Keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,957 atau 95,7%. Selanjutnya untuk pengujian signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan (Y) dengan menggunakan uji t dimana nilai thitung sebesar 88,909 yang lebih besar dari ttable 1,663 (thitung $88,909 > t_{tabel}$ 1,663) dan taraf signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan (Y) di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 – 2021.

Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan daerah, karena nantinya Pendapatan Asli Daerah yang akan menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan daerah. Pengukuran kemandirian keuangan suatu daerah diukur berdasarkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya dan juga lain-lain pendapatan yang sah [11].

Kemandirian keuangan Pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara masih rendah salah satu faktor penyebab yaitu kemampuan pendayagunaan sumber pendapatan yang masih rendah yang dalam hal ini mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hasil pengukuran kinerja Bapenda selama 4 tahun terakhir (2019-2022) yang cenderung menurun atau tidak tercapai terutama pada tahun 2021 dimana pada tahun ini terjadi pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi pencapaian kinerja dalam peningkatan pendapatan daerah. Namun demikian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tetap berupaya melakukan optimalisasi Pendapatan Daerah dengan strategi operasional dilapangan dan memberikan pelayanan prima bagi wajib pajak dan wajib retribusi [12].

Dari hasil dan fenomena faktor penyebab yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik Pendapatan Asli Daerah semakin baik tingkat Kemandirian Keuangan daerah, begitupun sebaliknya semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka semakin rendah tingkat Kemandirian Keuangan daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmat Saleh (2020) dan penelitian Adriani dan Wahid (2018) dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah [13], [8].

2. Pengaruh Dana Transfer ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Transfer ke Daerah berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 - 2021. Hasil pengujian hipotesis data dari tahun 2016 – 2017 menunjukkan bahwa dana Transfer ke Daerah (X_2) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kemandirian Keuangan (Y), sehingga hipotesis kedua diterima.

Nilai a (konstanta) diperoleh sebesar 2,284, nilai b_2 yang diperoleh sebesar -1,000 sehingga menunjukkan bahwa jika dana Transfer ke Daerah (TKD) naik 1 kali maka Kemandirian Keuangan (Y) akan menurun sebesar 1 kali. Selanjutnya untuk pengujian signifikansi pengaruh dana Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Kemandirian Keuangan (Y) dengan menggunakan uji t dimana nilai thitung sebesar 25,592 yang lebih kecil dari ttabel 1,663 (thitung 25,592 < ttabel 1,663) dan taraf signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) menunjukkan bahwa dana Transfer ke Daerah (X_2) berpengaruh signifikan namun negatif terhadap Kemandirian Keuangan (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 – 2021.

Dana Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dana Transfer ke Daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah. Dana Transfer ke Daerah dibutuhkan untuk membantuh mempercepat pembangunan daerah [14]. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana Transfer ke Daerah maka tingkat Kemandirian Keuangan daerah semakin menurun begitupun sebaliknya semakin rendah dana Transfer ke Daerah, maka tingkat Kemandirian Keuangan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmat Saleh (2020), Adriani dan Wahid (2018) dan Rahmat Qodri (2021) dimana penelitian tersebut menyatakan Dana Perimbangan (dan Tarnsfer ke Daerah) berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan daerah [13], [8], [15].

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan

Hasil penelitian dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan dana Transfer ke Daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan. Hal ini ditunjukkan pada perbandingan Fhitung dengan Ftabel dan signifikansi hitung berada di angka 0,05. Berdasarkan hasil pengujian statistik Uji Simultan (Uji F) Fhitung diperoleh 5678,650 > dari Ftabel 3,100 dan sig. hitung 0,000 < 0,05 (α : 5%) sehingga hipotesis tiga (H_3)

diterima. Namun terdapat perbedaan hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah terhadap Kemandirian Keuangan. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan, sehingga semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Selain itu, secara simultan Transfer ke Daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kemandirian Keuangan, sehingga semakin tinggi Transfer ke Daerah maka semakin rendah Kemandirian Keuangan

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmat Saleh (2020) dan penelitian Adriani dan Wahid (2018) dimana penelitian tersebut menyatakan Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan (dan Tarnsfer ke Daerah) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan daerah [13], [8].

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan secara parsial menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dengan memiliki hubungan secara positif terhadap Kemandirian Keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin baik Pendapatan Asli Daerah semakin baik tingkat Kemandirian Keuangan daerah, begitupun sebaliknya semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka semakin rendah tingkat Kemandirian Keuangan daerah.
2. Hasil perhitungan secara parsial menunjukkan variabel Transfer ke Daerah berpengaruh signifikan dengan memiliki hubungan secara negatif terhadap Kemandirian Keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana Transfer ke Daerah maka tingkat Kemandirian Keuangan daerah semakin menurun begitupun sebaliknya semakin rendah dana Transfer ke Daerah, maka tingkat Kemandirian Keuangan semakin meningkat.
3. Hasil perhitungan yang dilakukan (Uji F) variabel independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara secara umum bisa dinilai hanya dengan melihat indikator pada

variabel Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah. Pemerintah daerah harus memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dan Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.

Referensi

- [1] M. Ashari, Wahyunadi, and Hailuddin, "ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA (STUDI KASUS PERENCANAAN PARTISIPATIF TAHUN 2009-2013)," *J. Ekon. Kebijak. Publik*, 2015.
- [2] *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Indonesia, 1999.
- [3] *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Indonesia, 1999.
- [4] *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Indonesia, 2022.
- [5] E. Siswahto, "Analisis Input Output: Sektor Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara," Universitas Airlangga, 2020. [Online]. Available: <https://feb.unair.ac.id/index.php/sains/artikel-ilmiah/1906-analisis-input-output-sektor-pariwisata-provinsi-sulawesi-utara.html>
- [6] C. Mongkol, "Strategi Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Potensi Wisata Budaya di Kabupaten Minahasa," *Polit. J. Ilmu Polit.*, 2016, [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/159841/strategi-dinas-pariwisata-dalam-mengembangkan-potensi-wisata-budaya-di-kabupaten>
- [7] A. Rinin, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Parepare," Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- [8] Andriani R. Neneng Rina dan Wahid Nisa Noor, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015)," *J. Akunt.*, 2018, [Online]. Available: <http://103.123.236.7/index.php/jak/article/view/708>
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [10] Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah, "Laporan Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2016 - 2021." www.djpk.depkeu.go.id.
- [11] *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah*. Indonesia, 2021.
- [12] Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022," Sulawesi Utara, 2022.
- [13] R. Saleh, "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH," *J. Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuang. Publik*, vol. 15, no. 2, pp. 111–134, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>.
- [14] Machfud Sidik ; Benedictus Raksaka Mahi ; Robert Arthur Simanjuntak ; Bambang, *Dana alokasi umum : Konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah*. Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- [15] R. Qodri, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Palembang," Politeknik Negeri Sriwijaya, 2021.



© 2023 by the authors. Licensee Administro Journal
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).